

PENGARUH POLITIK TRANSAKSIONAL TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

(Viola Indora, Irawan Suntoro, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik transaksional terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh Politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif survey dengan pendekatan kuantitatif dan dengan teknik analisis korelasi. Pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan Regresi Sederhana. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 45279 DPT, sehingga sampel diambil dari rata-rata klaster sehingga menjadi 99 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Kata kunci: pemilihan kepala daerah, perilaku pemilih dan politik transaksional

**INFLUENCE OF POLITICAL TRANSACTIONAL
TO ELECTOR BEHAVIOR IN ELECTION OF REGIONAL LEADER**

(Viola Indora, Irawan Suntoro, Yunisca Nurmalisa)

ABSTRACT

This research aims to explain the influence of political transactional to election of regional leader. As for this research internal issue formula that is how the influence of political transactional to elector behavior in election of regional leader. The Method of this research is descriptive survey with quantitative approach and analyzes correlation technique. Data collecting use question form, interview and observation. Data analyze use the simple regression. Population in this research counted 45279 DPT, so that sample taken away from by mean cluster is 99 respondents. Pursuant to result of research which has been knowable that there is influence which significant between the influences of political transactional to elector behavior in election of regional leader.

Key word: election of regional leader, elector behavior and political transactional

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah salah satu wujud dari budaya demokrasi, di mana pemilu yang merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Pemilihan umum juga merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah. Sebagaimana menurut UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu, "Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejak tahun 1955 hingga 2009. Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2009 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan di tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kebijakan penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia setidaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati sebuah demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pilkada, namun berbagai masalah kemudian muncul sebagai bagian dari dinamika politik lokal dan hal ini menjadi tantangan bagi para elit daerah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, serta mengatur dan mengelola segala potensi daerah. Namun, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan di sana-sini, adapun permasalahan yang paling mencolok adalah mengenai perilaku yang dipilih maupun perilaku yang memilih.

Perilaku pemilih atau *voting behavior* dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang ditujukan kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh para pelaku politik. Perilaku pemilih itu bisa dikatakan partisipasi, non-partisipasi dan apatis. Perilaku tersebut sangat menentukan partai politik (Parpol)

mana dan siapa calon yang akan terpilih menjadi wakil-wakil rakyat dan pemimpin politik dalam suatu sistem politik. Serta perilaku pemilih sangat menentukan berlangsungnya kegiatan pemilihan umum di suatu negara. Demikian pentingnya hal itu bagi keberhasilan pencapaian tujuan politik mereka, maka banyak partai politik dan calon pemimpin politik melakukan berbagai upaya untuk dapat memengaruhi perilaku pemilih dalam masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan partai politik dan calon pemimpin politik untuk mempengaruhi perilaku pemilih adalah kampanye, dengan menggunakan strategi tertentu melalui upaya kampanye tersebut partai politik dan calon-calon pemimpin politik selalu menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Adapun strategi yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh calon-calon pemimpin politik dalam melakukan kampanye adalah menggunakan strategi yang tidak etis yaitu menggunakan strategi transaksi material.

Politik transaksional atau sering disebut dengan istilah "*money politic*" merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang, karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Strategi semacam ini mulai berkembang pada Pemilu 2004.

Adapun bentuk dari politik transaksional (*money politic*) antara lain dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako (beras, minyak dan gula) dan barang-barang lainnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Di antara pemilih, para pemilih tidak lagi secara suka mendukung partai. Mereka ikut mendukung, asalkan terdapat imbalan terhadap dukungan yang diberikan itu. Misalnya, mereka mau berkampanye asalkan mendapatkan uang transportasi, memperoleh pakaian dan imbalan-imbalan material lainnya dan terkadang mereka ada juga yang menerima imbalannya tetapi pada saat pemilihan berlangsung pemilih tidak memilih calon yang memberikan imbalan tersebut, hal ini dikarenakan mereka hanya menginginkan materialnya saja.

Begitupun pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara yang di laksanakan pada bulan September 2013 lalu, tepatnya di Kecamatan Kotabumi Selatan, dalam pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung di sana banyak terjadi penyimpangan politik yaitu sering maraknya kegiatan transaksi material atau *money politic* yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin politik kepada calon pemilih, dengan maksud tujuan yaitu untuk mempengaruhi perilaku pemilih di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kotabumi Selatan.

Adapun fenomena-fenomena mengenai sering terjadinya kegiatan politik transaksional atau *money politic* yaitu ketika peneliti mewawancarai salah satu masyarakat di Kecamatan Kotabumi Selatan menurut beliau, "Dalam menghadapi Pilkada Lampung Utara kemarin masih terdapat kegiatan politik transaksional

atau *money politic*". Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Bapak Kartono sebagai tokoh masyarakat setempat ia mengatakan bahwa, "Masalah *money politic* memang bukan sesuatu yang baru, contohnya pemilihan kepala desa saja, para calon membagikan sarung atau materi yang lain dengan harapan bisa terpilih. Bahkan ada orang yang sampai menghabiskan Rp 1 miliar hanya untuk kursi jabatan kepala desa". Tidak hanya Bapak Kartono saja, Ibu Lela yang bekerja sebagai salah satu pegawai di kecamatan Kotabumi Selatan mengatakan bahwa "Saya sendiri mendapatkan barang dari calon pemimpin Lampung Utara dan itu bukan satu calon hampir semuanya memberi bingkisan".

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Politik transaksional Terhadap Perilaku Pemilih dalam pemilihan kepala daerah di kecamatan kotabumi selatan Lampung utara Tahun 2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Politik Transaksional

Politik transaksional atau disebut juga dengan istilah "*money politik*" dapat dimaknai sebagai suatu jual beli atau tukar menukar, melainkan penilaian terhadap Visi, Misi dan Program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat oleh calon pemimpin politik. dipihak lain banyaknya contoh pemimpin yang sering melupakan masyarakatnya, mengakibatkan pergeseran makna transaksional kepada arah yang lebih kongkrit.

Menurut Riza Pahlevi (2012 : 1) "politik transaksional yaitu dapat dikatakan sebagai suatu politik dagang, ada yang yang menjual, maka ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Kalau dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Hal ini berarti ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Dalam kegiatan politik transaksional/politik transaksional tidak semata-mata hanya dibayar dengan uang, tetapi dalam beberapa kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang".

Menurut Kumorotomo (2009:14) ada beragam cara untuk melakukan politik uang/politik transaksional dalam Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan

sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas mengenai politik transaksional (*money politic*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik transaksional (*money politic*) adalah sebagai suatu kegiatan jual beli politik/kekuasaan (politik dagang) yang didalamnya mengandung unsur jual beli suara dan kekuasaan dengan menggunakan suatu alat pembayaran (uang) dan/atau dengan imbalan lainnya (jabatan dan imbalan tertentu di luar uang) yang dilakukan oleh bakal calon yang dipilih kepada bakal calon pemilih dengan maksud dan tujuan agar calon-calon yang bakal dipilih dapat menduduki kursi kepemimpinan dalam suatu lembaga pemerintahan atau dapat dikatakan menang dalam Pemilu.

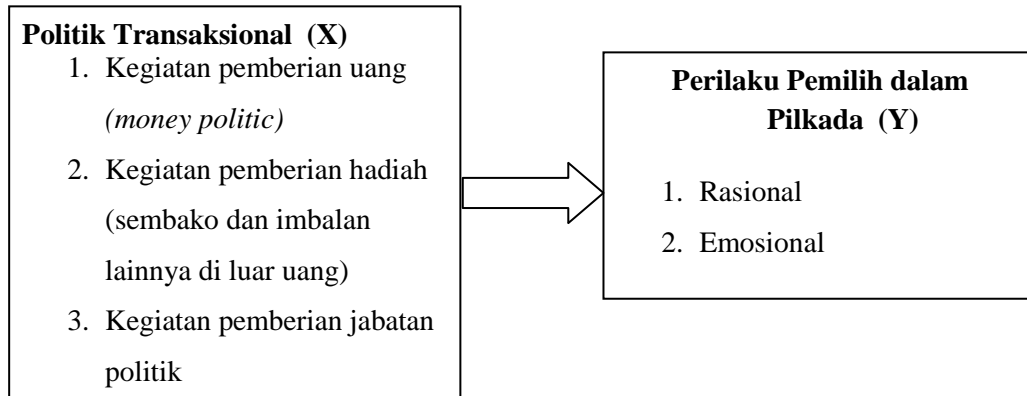
Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih atau dapat disebut dengan perilaku politik merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Menurut Ramlan Surbakti (2003:20) “perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik”. Perilaku pemilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Menurut J.Kristiadi, ”Perilaku Pemilih adalah keterkaitan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan factor psikologis, sosiologis dan faktor rasionalitas si pemilih atau disebut dengan *teory voting behavior*”.

Dapat disimpulkan perilaku pemilih adalah tingkah laku/sikap seseorang atau target politik dalam menentukan pilihannya yang di rasa paling disukai atau yang paling cocok

Perilaku pemilih bisa dikategorikan ke dalam dua besaran, yaitu: Perilaku memilih Rasional, notabane disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih. Sehingga pemilih, di sini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat manapun. Dan sebagian besar, pendasaran mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu. Selanjutnya perilaku memilih emosional, perilaku memilih ini lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti faktor sosiologis, struktur sosial, ekologi maupun sosiopsikologi.

Berdasarkan pemikiran di atas, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan ke dalam diagram penelitian berikut:



Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif survey dengan pendekatan kuantitatif dan dengan teknik analisis korelasi, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan disajikan sebagaimana adanya (Subana M. dan Sudrajat, 2001:26).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih berdasarkan Kelurahan/Desa yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebanyak 45.279 di Kecamatan Kotabumi Selatan. Jumlah populasi tersebut kemudian diambil rata-rata tiap klasternya sehingga diperoleh sampel sebanyak 99 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara, dan teknik observasi.

Angket sebelum digunakan dilakukan uji reliabilitas menggunakan rumus *product moment* dan *sperman brown*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dengan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan perhitungan uji validitas dan reliabilitas angket tersebut, maka diperoleh nilai $r_{xy} = 0,75$ selanjutnya dikonsultasikan dengan indeks reliabilitas yaitu indeks reliabilitas 0,50 – 0,89 termasuk dalam kategori sedang berarti angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien reliabilitas sedang. Dengan demikian angket tersebut dapat digunakan untuk mengadakan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyajian Data

Penyajian data pengaruh Politik transaksional Terhadap Perilaku Pemilih dalam pemilihan kepala daerah di kecamatan kotabumi selatan Lampung utara Tahun 2013, dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator kegiatan pemberian uang dalam Pilkada. Dari seluruh 99 responden, terdapat 9 responden (9,1%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian uang pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan tidak pernah terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan tidak pernah mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui serta tidak menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori sedang sebanyak 52 responden (52,6%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian uang pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan pernah terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan pernah mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori tinggi sebanyak 38 responden (38,3%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian uang pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan sering terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan sering mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator kegiatan pemberian hadiah dalam Pilkada. Dari seluruh 99 responden, terdapat 12 responden (12,1%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian hadiah pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan tidak pernah terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan tidak pernah mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui serta tidak menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori sedang sebanyak 35 responden (35,3%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian hadiah pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan pernah terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan pernah mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori tinggi sebanyak 52 responden (52,6%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian hadiah pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan sering terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan sering mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator kegiatan pemberian jabatan politik dalam Pilkada. Dari seluruh 99 responden, terdapat 22 responden (22,2%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian jabatan politik pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan tidak pernah terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan tidak pernah mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui serta tidak menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori sedang sebanyak 56 responden (56,6%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian jabatan politik pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan pernah terjadi, karena masyarakat Kotabumi Selatan pernah mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut. Pada kategori tinggi sebanyak 21 responden (21,2%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pemberian jabatan politik pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan sering terjadi,

karena masyarakat Kotabumi Selatan sering mendengar, melihat, mengetahui serta menerima adanya kegiatan tersebut.

4. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator perilaku pemilih masyarakat secara rasional dalam Pilkada. Dari seluruh 99 responden, terdapat 24 responden (24,2%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih kepala daerah tidak didasarkan atas latar belakang dan program kerja kandidat. Pada kategori kurang baik sebanyak 26 responden (26,3%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih kepala daerah sebagian didasarkan atas latar belakang dan program kerja kandidat. Pada kategori baik sebanyak 49 responden (49,5%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih kepala daerah didasarkan atas latar belakang dan program kerja kandidat.
5. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada indikator perilaku pemilih masyarakat secara emosional dalam Pilkada. Dari seluruh 99 responden, terdapat 25 responden (25,2%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih kepala daerah didasarkan atas pemberian uang, hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas kandidat. Pada kategori kurang baik sebanyak 34 responden (34,3%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih kepala daerah sebagian didasarkan atas pemberian uang, hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas kandidat. Pada kategori baik sebanyak 40 responden (40,5%) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih kepala daerah tidak didasarkan atas pemberian uang, hadiah, jabatan politik, fisik yang menarik, hubungan kekerabatan dan tingkat popularitas kandidat.

Pengujian Pengaruh

Model	R Square	r	t
1	.043	.206	2.077

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS 2.0 dapat diketahui bahwa nilai R square atau koefisien determinasi (R) dalam penelitian ini adalah 0,043 berarti pengaruh variabel politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 adalah sebesar 4,3% sedangkan sisanya sebesar 95,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu nilai korelasi (r) sebesar 0,206. Berdasarkan klasifikasi jawaban mengenai pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara Tahun 2013., menunjukkan tingkat keeratn hubungan kedua variabel adalah rendah karena termasuk rentang koefisien korelasi 0,20-0,399.

Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara Tahun 2013, digunakan uji t-. Dengan ketentuan:

1. Apabila t hitung $>$ t tabel dengan $dk = n-2$ dan $\alpha 0,05$ maka H_0 ditolak. Sebaliknya H_0 diterima.
2. Apabila Probabilitas (Sig.) $<$ $0,05$ maka H_0 ditolak. Sebaliknya H_0 diterima.

Diperoleh nilai t hitung 2.077 lebih besar dari nilai t tabel 1.984. Karena t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikan 5% maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh secara signifikan antara politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara Tahun 2013

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis di atas, dapat diketahui bahwa ada pengaruh secara signifikan antara politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara tahun 2013.

Adanya kegiatan jual beli politik tersebut hal ini secara tidak langsung mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Politik transaksional dapat menjadi sebuah stimulus yang dapat melemahkan pemilih/warga dan bahkan ada yang dapat memperkuat pemilih/warga. Adapun politik transaksional yang dapat melemahkan warga yaitu kegiatan politik transaksional menjadikan warga/pemilih sebagai mesin politik pemenangan kandidat dan melanggar hukum. Selain jual beli suara, bentuk lainnya adalah *klientelisme* (warga dijadikan 'mesin' politik kandidat) dan bias partisan (program untuk simpati warga).

Bentuknya mirip dengan jual beli suara dengan maksud menukar janji-janji kandidat dengan suara pemilih. Hasilnya adalah daftar proposal kepada para kandidat yang berisi permintaan uang untuk mengatasi masalah-masalah warga. Di sisi lain, kandidat pun menebarkan janji-janji untuk memberikan imbalan jika terpilih dan berusaha keras untuk memaksimalkan sumber-sumber ekonominya guna membiayai pencalonannya dan memenangkan persaingan. Tidak ada yang diuntungkan, kandidat dan warga/pemilih sebetulnya sama-sama merugi.

Sedangkan politik transaksional dapat menguatkan warga/pemilih yaitu peristiwa transaksi politik merupakan hal yang lazim ditemui dalam kompetisi Pemilu, maka Puskapol dan Demos mendorong adanya strategi transaksi politik yang menguatkan posisi dan kepentingan warga, khususnya pascapemilu. Tujuannya agar terjalin ikatan jangka panjang antara warga dengan kandidat pemenang Pemilu, di mana warga memiliki kendali terkait pemenuhan janji/program kandidat tersebut. Adapun strategi transaksi politik yang menguatkan warga memiliki ciri-ciri: terbuka, publik, jangka panjang, pendanaan negara dan tidak melanggar hukum.

Namun yang paling menonjol dalam kegiatan perpolitikan di Indonesia khususnya dalam Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara bahwa kegiatan politik transaksional sering melemahkan pemilih dalam menentukan calon pemimpin sebelum menjelang Pemilu. Pada kegiatan politik transaksional yang ada berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa semakin kegiatan politik transaksional sering dilakukan, maka akan semakin menentukan kepada perilaku pemilih untuk memilih calon pemimpin politik yang kuat melakukan jual beli politik kepada pemilih. Perilaku pemilih diorientasikan kepada semakin banyaknya uang, hadiah, pemberian jabatan politik, dan didasarkan pada pemikiran yang rasional dan emosional dalam menentukan calon pemimpin politik pada Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara Tahun 2013 sebesar 4,3%.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada beberapa indikator politik transaksional khususnya mengenai kegiatan pemberian uang dalam Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan pernah terjadi sebesar 52,6%, mengenai kegiatan pemberian hadiah (imbalan, sembako dan diluar uang) dalam Pilkada di Kecamatan Selatan sering terjadi sebesar 52,6%, mengenai kegiatan pemberian jabatan politik dalam Pilkada di Kecamatan Kotabumi Selatan pernah terjadi sebesar 56,6%. Kemudian pada indikator perilaku pemilih secara rasional memiliki perilaku yang baik sebesar 59,5% dan indikator emosional memiliki perilaku yang baik sebesar 40,5%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Banwaslu penulis menyarankan agar lebih intens lagi dalam mengawasi dan mengontrol setiap jalannya pelaksanaan pemilu khususnya di Kecamatan Kotabumi Selatan, agar kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Pemilu tidak terjadi lagi.
2. Kepada calon pemimpin politik di Lampung Utara, penulis menyarankan agar selalu menegakkan prinsip Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil agar nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan peraturan/konstitusi yang telah ditetapkan bersama. juga menyarankan agar kegiatan politik transaksional sebaiknya dijauhkan dari sistem

perpolitikan Indonesia khususnya di Kecamatan Kotabumi Selatan, karena hal tersebut dapat mencoreng system demokrasi Indonesia.

3. Kepada Masyarakat khususnya Kotabumi Selatan, penulis menyarankan agar selalu menegakkan prinsip Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil agar nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan peraturan/konstitusi yang telah ditetapkan bersama. Penulis juga menyarankan agar kegiatan politik transaksional sebaiknya dijauhkan dari sistem perpolitikan Indonesia khususnya di Kecamatan Kotabumi Selatan, karena hal tersebut dapat mencoreng system demokrasi Indonesia. Lalu masyarakat Kotabumi Selatan lebih peka lagi dalam memilih calon-calon pemimpin politik, supaya tidak menyesal dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. 2008. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004*. Surabaya: EUREKA
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Sistematis Teori dan Penerapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Surbakti Ramlan. 1999. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia.
- Irwansyah dkk. 2013. *Memperkuat warga melalui transaksi politik dalam pemilu*. Di akses pada 22 Desember 2013. <http://www.puskapol.ui.ac.id/press-release/press-release-memperkuat-warga-melalui-transaksi-politik-dalam-pemilu.html>